



Implementasi Program BSPS Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Dasar Ekonomi Masyarakat Penerima Bantuan PKE Di Desa Pucangombo Kabupaten Pacitan

Erni Dwi Astuti¹, Syamsul Huda², Anisa Fitria Utami³

^{1,2,3} Program Studi Ekonomi Pembangunan, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Received: 17 September 2023
Revised : 24 September 2023
Accepted: 30 September 2023

Abstrak

Implementasi Program BPSB Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Dasar Ekonomi Masyarakat Penerima Bantuan PKE Di Desa Pucangombo merupakan tujuan dari penelitian yang dilakukan penulis. Fokus program ini adalah meningkatkan kebutuhan dasar ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yaitu dengan menyediakan rumah layak huni. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang mana dilakukan dengan wawancara kepada pihak terkait dalam melaksanakan program BPSB di Desa Pucangombo. Pihak yang terkait dalam program ini yaitu Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Perumahan Kabupaten Pacitan, Perangkat Desa Pucangombo, Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL), penerima bantuan Desa Pucangombo. Pengumpulan data dapat dilakukan menggunakan metode wawancara yang jelas, mendalam serta hasil dari analisis dokumen. Dalam penelitian ini terkait hasil Implementasi Program BPSB dalam meningkatkan rumah layak huni di Desa Pucangombo dapat dilihat melalui standar dan sarana yang sesuai dengan pedoman menteri PUPR AE Nomor 11/SE/Dr/2022, hubungan komunikasi antara Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Perumahan Kabupaten Pacitan, perangkat desa, tenaga fasilitator lapangan dan penerima bantuan sudah berjalan dengan cukup baik, Hubungan antara tenaga fasilitator lapangan dan penerima bantuan sangat baik, Sosialisasi dan penyuluhan program BPSB di desa Pucangombo berjalan dengan lancar, Hasil dalam pelaksanaan program BPSB sudah terbangun rumah layak huni dengan kondisi aman, nyaman, sehat dan sesuai standar rumah layak huni.

Kata Kunci: *Kebutuhan Dasar Ekonomi, BPSB, Rumah Layak Huni.*

(*) Corresponding Author: ernidwiastuti16@gmail.com

How to Cite: Astuti E D, Huda S, & Utami A F. (2023). Implementasi Program BPSB Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Dasar Ekonomi Masyarakat Penerima Bantuan PKE Di Desa Pucangombo Kabupaten Pacitan. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8412782>.

PENDAHULUAN

Dalam meningkatkan taraf kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat maka negara Indonesia perlu melakukan pembangunan. Pemerintah Indonesia akan melakukan berbagai upaya untuk menjadikan negaranya maju. Pembangunan adalah bentuk upaya yang dilakukan pemerintah untuk merubah keadaan masyarakat menjadi sejahtera dan makmur melalui cara yang terarah dan terencana (DESYRA, 2021). Namun kenyataannya pembangunan yang ada di Indonesia belum dapat mensejahterakan dan memakmurkan masyarakat. Salah satu permasalahan pembangunan yang dapat terlihat adalah kemiskinan. Kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dapat dilihat dari angka kemiskinan yang berkurang pada suatu daerah. Kemiskinan merupakan keadaan dimana tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia terutama ekonomi yang meliputi sandang, papan dan

pangan. (Kumala Sari et al., n.d.). akibat kemiskinan masyarakat tidak mampu untuk memiliki rumah yang sehat dan layak untuk dihuni sebab penghasilan mereka rendah. Kemiskinan menyebabkan masyarakat tidak dapat memenuhi tempat tinggal yang sehat dan layak untuk dihuni karena penghasilan yang diperoleh rendah.

Di Indonesia kemiskinan merupakan permasalahan sosial yang terus meningkat. Kemiskinan merupakan permasalahan yang sulit untuk dapat dihindari dan telah menjadi masalah yang mendasar serta sulit untuk dihilangkan. Pacitan merupakan daerah yang memiliki angka kemiskinan yang cukup tinggi. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk miskin Kabupaten Pacitan tahun 2020 sebesar 80.820 jiwa kemudian naik di tahun 2021 sebesar 84.190 jiwa dan turun pada tahun 2022 sebesar 76.930 jiwa (Badan Pusat Statistik Kabupaten Pacitan, 2022). Meskipun mengalami penurunan di tahun 2023 akan tetapi masalah kemiskinan tetap membutuhkan perhatian yang serius bagi pemerintah.

Permasalahan kemiskinan di Indonesia yang cepat berkembang dikarenakan banyak masyarakat tidak mampu atau masyarakat berpenghasilan rendah. Masyarakat miskin tidak mampu memiliki tempat tinggal yang layak, lingkungan yang kumuh dan tidak memenuhi standar kesehatan. Faktor penyebabnya yaitu masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya tidak dapat memenuhi standar kebutuhan dasar ekonominya. Salah satu cara agar dapat meningkatkan kebutuhan dasar ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yaitu dengan menyediakan rumah layak huni. Tempat tinggal atau rumah layak huni sangatlah penting untuk kesejahteraan manusia sebab dengan ini masyarakat dapat berkembang menjadi masyarakat yang memiliki kehidupan lebih baik.

Rumah merupakan kebutuhan dasar ekonomi yang memiliki wujud berbeda-beda sesuai dengan pemilik dan orang yang menempatinnya. Rumah memberi rasa aman, nyaman dan tentram pada yang menempatinnya. Tidak hanya itu saja, rumah mempunyai peran sosial budaya untuk pendidikan keluarga sebagai persemaian budaya, dan kehidupan sebagai pewujudan jati diri bangsa. Rumah layak huni merupakan rumah yang mempunyai komponen sesuai kaidah konstruksi berdasarkan struktur dan non strukturnya. Kaidah konstruksi rumah yang sesuai yaitu bahan bangunan ber-Standar Nasional Indonesia, disetiap rumah terdapat sanitasi yang memadai, air minum yang tidak berbau dan tidak berwarna serta terdapat pencahayaan dan penghawaan dalam rumah. Akan tetapi, terdapat permasalahan yang ada pada masyarakat desa yaitu mereka tidak terpenuhinya kebutuhan tempat tinggal. Bagi mereka, rumah hanya menjadi tempat berlindung tanpa mengamati kelayakan rumah. Tidak hanya itu saja, rendahnya pengetahuan masyarakat berpenghasilan rendah tentang rumah layak huni menyebabkan mereka tidak memperhatikan keadaan kelayakan tempat tinggal yang dihuni (Jannah, 2023).

Di Indonesia ditemukan banyak rumah masyarakat yang tidak layak untuk dihuni, hal ini dibutuhkan dukungan dari Pemerintah. Sebab dalam memenuhi kebutuhan dasar ekonomi khususnya rumah maka Kementerian PUPR melalui Direktorat Rumah Swadaya membuat program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Program BSPS di peruntukan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) (Mamangkey et al., n.d.). Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR

Nomor 7 Tahun 2022, Program BSPS diperuntukan dalam meningkatkan rumah layak huni berlandaskan konsep kegotong royongan masyarakat dan sebagai bentuk dana dukungan dari pemerintah untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Dengan adanya program BSPS ini diharapkan masyarakat bergotong royong dalam keikutsertaan mendukung program BSPS dalam perbaikan rumah masyarakat berpenghasilan rendah. Keikutsertaan masyarakat ini dapat berupa bantuan dalam bentuk material bangunan, dana ataupun tenaga kerja. Tujuan dari BSPS ialah melakukan pemberdayaan masyarakat yang memiliki penghasilan di bawah standar untuk membangun sebuah rumah yang layak untuk dihuni, berkualitas, sehat dan aman.

Desa Pucangombo merupakan desa yang berada di Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan yang memperoleh Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Secara geografis Desa Pucangombo sebelah utara berbatasan dengan Desa Ploso Kecamatan Tegalombo, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Ketro Kecamatan Tulakang, sebelah timur berbatasan dengan Desa Binade Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo. Dalam program BSPS, Desa Pucangombo memperoleh bantuan kategori Penanganan Kemiskinan Ekstrem (PKE) sebanyak 19 penerima bantuan. Penanganan kemiskinan ekstrem dalam program BSPS adalah masyarakat berpenghasilan rendah dibawah UMK/UMP, memiliki ketidakmampuan daya beli, lansia tunggal atau janda. Mayoritas pekerjaan penerima bantuan kategori penanganan kemiskinan ekstrem di Desa Pucangombo yaitu petani, pekebun dan buruh kerja kasar. Rendahnya pendapatan masyarakat, program BSPS ini dapat sebagai pendorong untuk menambah nilai swadaya dalam meningkatkan rumah yang layak untuk dihuni yang memiliki fasilitas prasarana, sarana dan fasilitas umum. Dengan adanya BSPS ini masyarakat Desa Pucangombo yang mempunyai latar belakang masyarakat berpenghasilan rendah penanganan kemiskinan ekstrem memperoleh bantuan untuk meningkatkan kualitas rumah layak huni.

Dalam program BSPS penanganan kemiskinan ekstrem di Desa Pucangombo masih terdapat pelaksanaan kerja yang belum maksimum dalam pemenuhan kebutuhan dasar ekonomi yaitu rumah layak huni. Pelaksanaan ini kurang maksimum diakibatkan karena masyarakat penerima bantuan PKE memiliki keterbatasan dalam menyediakan nilai swadaya. Tidak hanya itu saja kondisi jalan yang ekstrem membuat penerimaan bahan material menjadi terlambat dan proses pengerjaan rumah terhambat. Ketersediaan tukang bangunan yang sedikit juga menghambat program BSPS. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mengetahui permasalahan dalam program BSPS akan tetapi juga dalam ketepatan sasaran program BSPS, hubungan pemerintah desa dengan tenaga fasilitator lapangan, hubungan tenaga fasilitator lapangan dengan penerima bantuan, sosialisasi dan penyuluhan program BSPS dan pencapaian tujuan program BSPS bagi MBR di Desa Pucangombo, Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan. Berdasarkan permasalahan yang ada di Desa Pucangombo dalam meningkatkan kualitas rumah layak huni maka penulis ingin melakukan penelitian yang berjudul "Implementasi Program BSPS Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Dasar Ekonomi Masyarakat Penerima Bantuan PKE Di Desa Pucangombo".

TINJAUAN PUSTAKA

Kemiskinan

Secara umum, kemiskinan merupakan kondisi ketika seseorang tidak mempunyai kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup yaitu sandang, papan maupun pangan (Maulana & Iqbal Fasa, 2022). Pengertian kemiskinan secara etimologi berasal dari kata dasar miskin yang artinya masyarakat yang tidak memiliki harta benda, mempunyai penghasilan rendah dan serba kekurangan (Abdul Mu'is, 2019). Definisi kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik yaitu seseorang yang secara ekonomi memiliki ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasarnya (Badan Pusat Statistik Kabupaten Pacitan, 2022). Kemiskinan merupakan keadaan hidup seseorang yang mengacu pada kondisi serba kekurangan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya dan tidak dapat merasa kecukupan seperti dalam hal gizi, air bersih, rumah layak huni, kesehatan, pendidikan dan pendapatan yang tinggi (Purnama, n.d.). Kemiskinan adalah permasalahan yang kompleks dan tidak hanya dapat dipahami sebagai ketidak berdayaan memenuhi kemampuan ekonomi tetapi juga kegagalan dalam memenuhi hak dasar (ASNA ANETA, 2010). Kemiskinan dapat terjadi sebab ketidakmampuan masyarakat untuk keluar dari persoalan kemiskinan yang dihadapinya.

Kebutuhan Dasar Ekonomi

Kebutuhan dasar ekonomi merupakan kebutuhan pokok manusia. Untuk melanjutkan keberlangsungan hidup manusia, kebutuhan dasar ekonomi ini sangat penting. Oleh karena itu setiap manusia selalu berusaha dalam memenuhi kebutuhan dasar ekonominya. Kebutuhan dasar ekonomi ini seperti pakaian, makanan dan pendidikan (Saputra Uin et al., 2022). Kebutuhan dasar yang tidak kalah penting selain pakaian, makanan dan pendidikan yaitu rumah. Rumah digunakan sebagai kebutuhan dasar sebagai tempat tinggal manusia. Setiap tahunnya penduduk Indonesia semakin tinggi dan memungkinkan juga jumlah rumah yang ada di Indonesia juga semakin banyak. Rumah adalah tempat pendidikan pertama sebagai manifestasi jati diri seseorang. Rumah merupakan kebutuhan dasar ekonomi yang memiliki wujud berbeda-beda sesuai dengan pemilik dan orang yang menempatinnya.

Rumah Layak Huni

Kebutuhan dasar ekonomi yang harus dipenuhi suatu keluarga selain sandang dan papan adalah rumah. Rumah merupakan suatu bangunan berbentuk fisik sebagai tempat tinggal yang dilengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh manusia. Rumah digunakan sebagai tempat berlindung dari bencana ataupun makhluk hidup yang lain. Rumah juga digunakan sebagai tempat berkumpulnya suatu keluarga untuk meluangkan waktu. Rumah harus memiliki kriteria antara lain yaitu kenyamanan, keamanan dan kesehatan sebagai pendukung penghuni untuk lebih produktif.

Menurut undang-undang No 1 tahun 2011 tentang perumahan dan pemukiman, rumah merupakan bangunan yang memiliki fungsi untuk tempat tinggal yang layak huni, sebagai sarana pendidikan keluarga, dan harta untuk pemilikinya (DESYRA, 2021). Pelaksanaan pembangunan rumah layak huni harus berdasarkan fungsi manfaat, keselamatan, keseimbangan, efektif, efisien dan sesuai kebutuhan. Kondisi yang dimiliki rumah layak huni harus memenuhi luas bangunan

yang cukup untuk aktivitas sehari-hari, harus ada akses air bersih, terdapat sanitasi yang layak, terdapat pencahayaan dan penghawaan di setiap luas lantai dan memperoleh pembagian ruangan. Kondisi lingkungan rumah layak huni harus terdapat saluran pembuangan air yang memenuhi standar, tidak berdekatan dengan tempat akhir pembuangan sampah, tidak berdekatan dengan pabrik yang terdapat banyak pulusi, tidak rawan longsor atau bencana lainnya, rumah tidak berada disamping atau diatas sungai.

Manfaat dari adanya rumah layak huni adalah rumah tampak indah, rumah memberikan kenyamanan bagi penghuninya, penghuni yang menempati rumah menjadi sehat. Terdapat syarat rumah dikatakan layak huni yaitu rumah harus mempunyai keselamatan bangunan, rumah harus mempunyai kecukupan luas minimum bangunan dan syarat kesehatan dan keamanan penghuni. Memenuhi keselamatan bangunan yang dimaksud adalah bahan material yang digunakan dalam membangun rumah harus ber-Standar Nasional Indonesia. Luas bangunan dalam rumah layak huni yaitu luas lantai perorang adalah 7,2m². Rumah layak huni yang sehat adalah tersedianya sanitasi yang ada di setiap rumah, tersambung ke saptic tank yang di sedot minimal 5 tahun sekali, air minum yang terseia dan tidak berbau, tidak berwarna, tidak berasa serta tidak mengandung mikroorganisme dan logam berat.

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)

BSPS merupakan program Pemerintah dalam bentuk dana bantuan untuk masyarakat berpenghasilan rendah sebagai bentuk stimulan swadaya dalam meningkatkan kualitas rumah layak huni bernilai swadaya (Tulus Rully Mambo et al., 2022). Rumah swadaya dibangun atas ikhtiar masyarakat dalam melakukan perbaikan yang dilengkapi sarana, prasarana dan utilitas umum (DESYRA, 2021). Prinsip BSPS adalah mendorong MBR atau penerima bantuan penanganan kemiskinan ekstrem (PKE) untuk ikut serta mempersiapkan, merencanakan, melaksanakan, memanfaatkan, pengawasan dan pengendalian dalam membangun meningkatkan rumah layak huni yang aman, sehat, bernilai tinggi milik penerima bantuan itu sendiri. Pelaksanaan program BSPS dilakukan berdasarkan pemberdayaan masyarakat penerima bantuan dalam rencana penanganan rumah tidak layak huni (Tulus Rully Mambo et al., 2022). Pelaksanaan mekanisme BSPS ini memberikan hunian yang sehat dan tepat sasaran pada masyarakat berpenghasilan rendah atau penanganan kemiskinan ekstrem (PKE) agar memperoleh hunian yang layak. Program BSPS dalam pelaksanaannya berbentuk bantuan uang sebagai pembelian bahan material dan upah pekerja.

METODE PENELITIAN

Penelitian tentang Implementasi Program BSPS terhadap Pemenuhan Kebutuhan Dasar Ekonomi Masyarakat Penerima Bantuan PKE di Desa Pucangombo digunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan berupa kualitatif. Metode deskriptif merupakan data bukan angka melainkan kata-kata atau gambar (Mulyadi, n.d.). Metode penelitian deskriptif memiliki tujuan sebagai bentuk gambaran mengenai suatu kelompok atau masyarakat tertentu dan gambaran hubungan suatu gejala. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan dalam menganalisis fenomena sosial, peristiwa, pemikiran individu ataupun kelompok dan sikap seseorang. Pendekatan kualitatif

menggunakan data yang dihimpun dengan mengamati dengan seksama. Cakupan dalam penelitian ini memiliki konteks yang mendalam disertai catatan berupa hasil wawancara yang jelas dan hasil dari analisis dokumen (Mulyadi, n.d.). Sumber data wawancara diperoleh dari tenaga fasilitator lapangan, pemerintah desa dan penerima bantuan.

Dari yang telah dijelaskan diatas maka penulis menggunakan analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hal ini dikarenakan penelitian ini dapat menggambarkan fenomena secara faktual maupun sistematis. Peneliti berusaha memperoleh data dengan baik kemudian peneliti dapat mendeskripsikan data tersebut sesuai dengan yang ditemukan di lapangan. Tidak hanya itu saja, peneliti memiliki alasan menggunakan metode ini karena pendekatan kualitatif ini mampu memberikan jawaban atas pertanyaan yang akan diajukan dan mempermudah memperoleh data sebagai jawaban atas permasalahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Program BSPS Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Dasar Ekonomi Masyarakat Penerima Bantuan PKE Di Desa Pucangombo

Dalam upaya mendukung mengurangi kemiskinan yang ada di Indonesia, Kementrian PUPR membuat dan menyelenggarakan suatu program yaitu BSPS. Program BSPS menjadi program unggulan dari Kementrian PUPR yang memiliki tugas untuk mengatur permasalahan perumahan sebagai bentuk kepedulian yang dilakukan pemerintah atas penyelenggaraan pembangunan hunian yang layak bagi masyarakat MBR (Ida Farida, 2020). Implementasi program BSPS merupakan program yang melibatkan masyarakat dalam berpartisipasi serta bertanggungjawab atas mekanisme penyelenggaraan yang meliputi mempersiapkan, melaksanakan, mengawasi dan mengendalikan, dan penengendalian.

Berhasilnya implementasi program BSPS ini tidak terlepas dari partisipasi anggota masyarakat baik secara kesatuan penyelenggaraan ataupun individu. Hal ini dikarenakan prinsip dalam pembangunan ditujukan agar menjadikan masyarakat sejahtera. Oleh karena itu berhasil atau tidaknya implementasi program BSPS ini tidak hanya berada di tangan pemerintah saja namun juga tanggung jawab masyarakat. Adanya program pemerintah daerah dalam menyelenggarakan program BSPS yaitu sebagai upaya dalam meningkatkan dan mendorong keswadayaan penerima bantuan untuk mewujudkan rumah layak huni yang aman, nyaman dan sehat (Ida Farida, 2020).

1. Ketepatan sasaran program

Dilihat dari standart dan sasaran implementasi program BSPS di Desa Pucangombo terhadap pemenuhan kebutuhan dasar ekonomi yaitu rumah oleh masyarakat penerima bantuan Penanganan Kemiskinan Ekstrem (PKE) sudah sesuai dengan pedoman Peraturan Menteri PUPR SE Nomor 14/SE/Dr/2022 tentang petunjuk teknis penyelenggaraan program BSPS. Standar dan sasaran program BSPS ini telah berhasil diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah khususnya PKE di Desa Pucangombo yang tidak mempunyai rumah layak huni. Hal ini tidak terlepas dari kontribusi yang dilakukan oleh penerima bantuan, perangkat desa dan tenaga fasilitator lapangan (TFL) yang bekerja sama dalam mengimplementasi program BSPS di Desa Pucangombo agar dapat berjalan dengan baik. Dalam mendukung pelaksanaan program ini Tenaga fasilitator lapangan

didampingi perangkat desa melaksanakan proses BSPS ini berdasarkan mekanisme penyelenggaraan mulai dari persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian sampai dengan tahap pelaporan.

2. Komunikasi instansi terkait BSPS, tenaga fasilitator lapangan dan penerima bantuan

Implementasi program BSPS diperlukan adanya dukungan serta koordinasi dengan instansi lain. Hal ini diperuntukan sebagai keberhasilan program BSPS dalam penyediaan hunian yang layak masyarakat PKE Desa Pucangombo. Pelaksanaan program BSPS di Desa Pucangombo ini ditangani oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Perumahan (PERKIMTAN) Kabupaten Pacitan. Peneliti melihat terjalannya hubungan komunikasi dalam melaksanakan program BSPS di Desa Pucangombo antara PERKIMTAN, perangkat desa, tenaga fasilitator lapangan dan penerima bantuan sudah berjalan dengan cukup baik. Berdasarkan wawancara dengan salah satu perangkat desa yang dilakukan di kantor Desa Pucangombo, beliau menyebutkan bahwa masyarakat dan perangkat desa lainnya sangat mendukung program BSPS ini sebab program ini dapat membantu masyarakat miskin khususnya PKE untuk mempunyai tempat tinggal yang layak huni.

3. Hubungan tenaga fasilitator lapangan dengan penerima bantuan BSPS

Dalam wawancara pada penerima bantuan masyarakat PKE Desa pucangombo, mereka menyebutkan bahwa hubungan antara tenaga fasilitator lapangan dan penerima bantuan sangat baik. Penerima bantuan sangat senang dan menghargai tenaga fasilitator lapangan karena telah membantu mendampingi dalam penyusunan proposal sampai tahap pembangunan rumah selesai. Bentuk pendampingan yang dilakukan oleh tenaga fasilitator lapangan dapat berpengaruh langsung terhadap kinerja pelaksanaan program BSPS penanganan kemiskinan ekstrem Desa Pucangombo. Pada pelaksanaan ini, tenaga fasilitator dapat memberikan implementasi yang positif sebab tenaga fasilitator lapangan mampu dalam memberikan pengetahuan kepada masyarakat penerima bantuan tentang program BSPS. Hal ini dapat dilihat pada saat tenaga fasilitator lapangan memberikan sosialisasi tentang program BSPS dalam meningkatkan kualitas hunian yang layak berasaskan kegotongroyongan dan nilai swadaya tambahan serta pendampingan berdasarkan mekanisme penyelenggaraan mulai dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.

4. Sosialisasi dan penyuluhan program BSPS

Sebelum dan saat pelaksanaan program BSPS dilakukan sosialisasi untuk memberikan pengetahuan kepada penerima bantuan. Metode yang digunakan diselenggarakan terkait dengan karakteristik masyarakat setempat yaitu menggunakan pertemuan yang diselenggarakan secara langsung di kantor Desa Pucangombo. Dalam sosialisasi tersebut disampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan pentingnya hunian yang layak, persyaratan, gambaran dan kriteria penerima program BSPS. Penyuluhan adalah bentuk pengarahan dan bimbingan kepada masyarakat terkhusus calon penerima bantuan (CPB) program BSPS. Dalam penyuluhan disampaikan beberapa hal yang meliputi prosedur, tanggung renteng, sanksi serta ketentuan dalam pelaksanaan program BSPS.

Sosialisasi dan penyuluhan program BSPS di desa Pucangombo berjalan dengan lancar. Penerima bantuan dapat memahami dan mengerti terkait program

BSPS. Dilakukannya sosialisasi dan penyuluhan maka penerima bantuan mengetahui mekanisme penyelenggaraan BSPS mulai dari mempersiapkan, merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan mengendalikan, memanfaatkan.

5. Pencapaian tujuan program BSPS di Desa Pucangombo

Hasil dalam pelaksanaan program BSPS dalam memenuhi kebutuhan dasar ekonomi rumah layak huni penerima bantuan penanganan kemiskinan ekstrem sudah terbangun hunian yang layak sesuai standar perumahan. Hasil dari penyelenggaraan program tersebut di desa Pucangombo dapat dikategorikan baik. Berdasarkan hasil wawancara salah satu penerima bantuan kondisi rumah setelah adanya pembangunan melalui program BSPS memiliki kualitas yang baik, kokoh dan aman. Hal ini didukung dengan adanya pondasi serta kerangka rumah yang kuat. Tidak hanya itu, dengan adanya program BSPS rumah menjadi sehat karena adanya sanitasi yang layak dan kebutuhan air terpenuhi.

Kendala pada saat Implementasi Program BSPS Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Dasar Ekonomi Masyarakat Penerima Bantuan PKE Di Desa Pucangombo

Terdapat kendala saat mengimplementasikan program BSPS dalam memenuhi kebutuhan dasar ekonomi seperti rumah layak huni masyarakat PKE di desa Pucangombo. Kendala tersebut seperti bantuan dana dari pemerintah yang sedikit sebab bantuan tersebut dalam bentuk dana stimulan dan harus ada keswadayaan dalam masyarakat penerima bantuan. Bantuan dana yang dikeluarkan dalam BSPS yaitu berupa bahan material serta upah kerja dalam bentuk uang. Bantuan dana BSPS sebesar Rp. 20.000.000 yang terdiri dari Rp. 17.500.000 untuk bahan material dan uang tunai Rp 2.500.000 untuk membantu membayar upah tukang. Penerima bantuan banyak yang mengeluh sebab mereka sulit dalam memperoleh swadaya tambahan.

Berdasarkan hasil wawancara tenaga fasilitator lapangan terdapat 19 penerima bantuan penanganan kemiskinan ekstrem (PKE) di Desa Pucangombo. Dari hasil survei lapangan terdapat 11 kepala keluarga yang tidak bersedia menerima bantuan BSPS. Hal ini dikarenakan tidak adanya swadaya tambahan dari penerima bantuan sehingga mereka menolak bantuan tersebut. Akan tetapi agar implementasi BSPS ini tetap berjalan lancar maka 11 kepala tersebut dicarikan ganti sesuai dengan ketentuan BSPS. Jadi dapat disimpulkan program BSPS ini tepat sasaran dan sudah optimal dimana yang awalnya terdapat penerima bantuan yang menolak dapat terealisasi sebanyak 19 penerima bantuan.

Keterlambatan pengiriman bahan material menjadi kendala dalam implementasi program BSPS terhadap pemenuhan kebutuhan dasar ekonomi rumah layak huni masyarakat penerima bantuan PKE di Desa Pucangombo. Hal ini dikarenakan medan jalan menuju rumah penerima bantuan terjal dan aksesnya kurang bagus. Selain itu lokasi rumah penerima bantuan berada di perbukitan, cuaca yang tidak mendukung ketika hujan mengakibatkan jalannya licin dan berbahaya untuk dilewati motor atau truk pengangkut material, serta jarak antar rumah yang relatif jauh dan masih tanah. Akan tetapi permasalahan ini bisa diatasi dengan mengirimkan bahan material di titik tempat dimana dapat dilalui truk kemudian penerima atau tukang bangunan dapat mengambilnya menggunakan gerobak dorong.

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam melaksanakan program BSPS tukang bangunan merupakan faktor yang paling penting. Namun pada kenyataannya ketersediaan tukang bangunan dalam program BSPS tidak mencukupi. Hal ini menyebabkan program BSPS di Desa Pucangombo menjadi terhambat. Selanjutnya yang menjadi faktor penghambat lainnya adalah pembayaran upah tukang. Pada aturan BSPS pembayaran upah dilakukan secara tanggung renteng. Tanggung renteng yang dimaksud adalah upah tukang dicairkan ketika pembangunan rumah sudah selesai. Apabila dalam suatu kelompok penerima bantuan terdapat rumah yang belum jadi maka pencairan upah tukang tidak dapat dicairkan.

KESIMPULAN

1. Dilihat dari standart dan sasaran implementasi program BSPS di Desa Pucangombo terhadap pemenuhan kebutuhan dasar ekonomi yaitu rumah oleh masyarakat penerima bantuan Penanganan Kemiskinan Ekstrem (PKE) sudah sesuai dengan pedoman Peraturan Menteri PUPR SE Nomor 14/SE/Dr/2022 tentang petunjuk teknis penyelenggaraan program BSPS.
2. Hubungan komunikasi dalam melaksanakan program BSPS di Desa Pucangombo antara Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Perumahan Kabupaten Pacitan, perangkat desa, tenaga fasilitator lapangan dan penerima bantuan sudah berjalan dengan cukup baik.
3. Hubungan antara tenaga fasilitator lapangan dan penerima bantuan sangat baik.
4. Sosialisasi dan penyuluhan program BSPS di desa Pucangombo berjalan dengan lancar.
5. Hasil dalam pelaksanaan program BSPS dalam memenuhi kebutuhan dasar ekonomi rumah layak huni penerima bantuan penanganan kemiskinan ekstrem sudah terbangun rumah layak huni dengan kondisi aman, nyaman, sehat dan sesuai standar rumah layak huni.
6. Kendala program BSPS penerima bantuan di desa Pucangombo seperti bantuan dana dari pemerintah yang sedikit, Keterlambatan pengiriman bahan material, dan ketersediaan tukang yang sedikit sudah mendapatkan solusi dan program BSPS berjalan dengan baik dan tepat waktu.

SARAN

Terkait dengan Implementasi Program BSPS Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Dasar Ekonomi Masyarakat Penerima Bantuan PKE Di Desa Pucangombo maka peneliti perlu untuk memberikan saran terhadap Pemerintah Kementerian PUPR untuk meningkatkan jumlah dana stimulan yang diberikan kepada penerima BSPS PKE. Hal ini dikarenakan stimulan yang diberikan belum mampu menyukupi akan pembangunan hunian bagi masyarakat. Jumlah rumah tidak layak huni yang ada di Desa Pucangombo Kabupaten Pacitan masih terbilang cukup banyak maka perlu adanya perhatian dari Pemerintah untuk memberikan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.

Concerning the research, authorship, and publication of this paper, the author(s) reported no potential conflicts of interest.

REFERENSI

- Abdul Mu'is. (2019). *Kemiskinan dalam prespektif Al quran*.
- ASNA ANETA. (2010). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN PERKOTAAN (P2KP) DI KOTA GORONTALO*.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pacitan. (2022). *Perkembangan Angka Kemiskinan kabupaten Pacitan*.
- DESYRA, T. E. , D. S. , & L. V. (2021). *IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA DALAM PENYEDIAAN RUMAH LAYAK HUNI DI DESA TOLOK SATU KECAMATAN TOMPASO KABUPATEN MINAHASA*.
- Ida Farida. (2020). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) PADA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DI KABUPATEN SUBANG*.
- Jannah, H. M. , S. E. , & A. H. W. (2023). *Efektifitas Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Di Desa Siwalempu Kecamatan Sojol*.
- Kumala Sari, W., Montessori, M., Kunci, K., Bantuan Perumahan Swadaya, P., Tidak Layak Huni, R., & Koto VIII Pelangai, K. (n.d.). Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Terhadap Rumah Layak Huni di Kenagarian Koto VIII Pelangai. In *Journal of Civic Education* (Vol. 3, Issue 3). www.perumahan.pu.go.id/rumahswad
- Mamangkey, A., Lumolos, J., & Pangemanan, F. (n.d.). *PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) DI KECAMATAN AMURANG TIMUR KABUPATEN MINAHASA SELATAN*.
- Maulana, A., & Iqbal Fasa, M. (2022). *PENGARUH TINGKAT KEMISKINAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DALAM PERSPEKTIF ISLAM*. 15(01). <https://doi.org/10.46306/jbbe.v15i1>
- Mulyadi, A. (n.d.). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA DI KOTA SUKABUMI*.
- Purnama, N. I. (n.d.). *ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI SUMATERA UTARA*.
- Saputra Uin, J., Thaha, S., & Jambi, S. (2022). Upaya Pemerintah Mengurangi Kemiskinan Dengan Program Bedah Rumah di Kota Jambi. In *Iltizam Journal of Shariah Economic Research* (Vol. 6, Issue 1).
- Tulusan Rully Mambo, F. G., Kunci, K., & Stimulan Perumahan Swadaya, B. (2022). *EVALUASI PROGRAM BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA DI DESA KANONANG LIMA KECAMATAN KAWANGKOAN BARAT SINDI INJILIN KOAMPA*. In *Jurnal Administrasi Publik JAP No* (Vol. 117).